

TAJUK RENCANA

Perkawinan Anak Rawan KDRT

MASALAH perkawinan anak masih saja terjadi. Kali ini di Ponorogo Jawa Timur. Pengadilan agama agama Ponorogo, selama tahun 2022 yang lalu menerima 191 permohonan anak menikah dini. Dari jumlah tersebut, dispensasi menikah dini pada usia terbanyak antara 15 hingga 19 tahun ada 184 perkara. Sisanya pemohon umurnya di bawah 15 tahun ada 7 perkara (KR 16/1).

Jumlah tersebut baru di Ponorogo, belum lagi daerah lain di Indonesia. Komnas Perempuan mengungkapkan ketika mempertanyakan HAN (Hari Anak Nasional) 2022 ada 59.709 kasus dispensasi pernikahan dikabulkan oleh Pengadilan Agama sepanjang 2021. Hal ini berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022.

Seperti kita ketahui, salah satu terkait perkawinan yang diatur oleh negara adalah batasan usia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 16/2019), mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.

Meski pemikahan dini dilarang, tapi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019 masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun tersebut. Yaitu dengan cara orang tua pihak lelaki dan/atau perempuan meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang dimaksudkan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019.

Pemohonan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam (Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019).

Keadaan mendesak yang terjadi selama ini adalah: kehami-

lan sebelum menikah, tekanan sosial dan budaya yang banyak terjadi daerah pedesaan. Kemudian faktor ekonomi menjadi masalah yang sangat berat. Pemicu lain adalah teknologi internet dan media sosial yang sering lepas kontrol kontennya. Faktor pendidikan yang masih terbatas, membuat pemicu terjadi perkawinan usia dini. Bahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPSA) Bintang Puspayoga menekankan bahwa perkawinan anak, menggerus cita-cita bangsa menciptakan SDM unggul dan berdaya saing. Sebab memicu tingginya angka putus sekolah.

Perkawinan usia dini, sangat rentan masalah. Selama ini, menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Darwin, adalah terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, kasus stunting atau kekerdilan pada anak. Keluarga perkawinan dini tersebut, dipaksa untuk bisa bekerja mencari penghasilan dengan menjadi pekerja apapun, dengan gaji rendah. Yang ujung-ujungnya adalah akan menambah keluarga miskin baru.

Sebuah perkawinan membutuhkan kesiapan baik sosial, ekonomi dan mental serta budaya untuk menuju rumahtangga yang harmonis. Karenanya kesiapan lahir dan batin sangat diperlukan. Sedangkan pada perkawinan anak bisa disebut jauh dari kesiapan. Yang paling sering terjadi, misalnya pada perempuan usia di bawah 18 tahun, dikhawatirkan kondisi fisiknya sangat rentan ketika melahirkan. Sehingga rentan terjadinya angka kematian ibu melahirkan, anemia, ketika siapan mental serta terjadinya malnutrisi.

Itulah sebabnya faktor pencegahan sangat ditekankan, khususnya pada orang tua untuk bisa mengawasi putra putrinya. Demikian juga peran pihak lain, sangat diperlukan. Selain sekolah, pemerintahan, media dan semua elemen masyarakat untuk mencegah terjadinya kasus tersebut. (***)

Mempersiapkan Pelaksanaan Ibadah Haji 2023

MENGAWALI 2023 ada kabar mengembirakan untuk para jemaah calon haji Indonesia. Pemerintah Arab Saudi memberikan kuota sebanyak 221 ribu jemaah pada musim haji tahun ini (KR, 9/1). Tak hanya itu, hal lain yang mengembirakan pada musim haji tahun ini, tidak ada pembatasan usia. Dengan demikian, calon jemaah haji yang berusia lanjut pun jika sudah terdaftar mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan rukun Islam kelima ini.

Apa yang dilakukan Kemenag yang terus berupaya berkomunikasi secara intens dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi agar kuota haji Indonesia dikembalikan seperti semula, layak diapresiasi. Bahkan, seperti dituturkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief, Indonesia menginginkan kuota itu ditambah lagi. Pasalnya, jumlah jemaah calon haji yang mengantre sudah cukup banyak.

Daftar tunggu ibadah haji yang tersaji dalam aplikasi Haji Pintar atau website Ditjen PHU menunjukkan data estimasi keberangkatan yang semakin lama. Provinsi DIY misalnya, masa tunggu hingga 30 tahun. (kemenag.go.id)

Masalah Kesehatan

Musim haji tahun ini tidak ada pembatasan usia, maka penyelenggaraan ibadah haji perlu dipersiapkan secara matang. Paling utama adalah masalah kesehatan para jemaah. Seperti diketahui jemaah calon haji dari Indonesia hampir separo dari jumlah yang ada adalah lanjut usia (lansia). Tanpa bermaksud meremehkan, umumnya mereka berisiko tinggi (risti). Sebagai gambaran pada musim haji tahun 2019, dari 212.681 jemaah, 44,39% berisiko tinggi.

Untuk menangani hal ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 14/2016 tentang *istitioah* (kemampuan), yakni setiap

Mohammad Sobirin

jemaah risti diperiksa untuk mengetahui kadar kemampuannya melaksanakan ibadah haji. Jika sudah diketahui, dilakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan minimal dua tahun sebelum keberangkatan.

Dengan mengetahui sejak awal ke-



KR-JOKO SANTOSO

mampuan jemaah haji yang kemudian masuk kategori risti, harapannya akan memudahkan petugas haji melakukan penanganan di lapangan. Terutama ketika para jemaah melakukan kegiatan yang sifatnya fisik, seperti *thawaf, sai* (berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah), wukuf di Arafah, melempar jumrah, *mabit* di Muzdalifah dan Mina.

Sejak beberapa tahun terakhir, perbaikan demi perbaikan layanan penanganan dan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci menunjukkan kemajuan. Pemerintah Arab Saudi sendiri juga terus berbenah untuk memberikan kenyamanan bagi jemaah haji. Kompleks Masjidil Haram diperluas, sehingga memudahkan saat melaksanakan thawaf, lebih-lebih bagi jemaah risti kini tak perlu harus berdesak-desakan. Mereka bisa

memilih berthawaf di lantai atas.

Pada musim haji 2022, petugas haji di sekitar Masjidil Haram juga ditambah. Karena, banyak jemaah haji dari Indonesia saat berada di tempat itu, sering mengalami kebingungan ketika hendak pulang kembali ke hotel tempat menginap (pemondokan). Begitu pula penyediaan tenda-tenda wukuf di Arafah semakin nyaman, termasuk penambahan alat pendingin (AC) yang maksimal.

Pemetaan

Dilakukannya pemetaan sejak awal tentang kategori jemaah risti dan pemberian tanda menjadikan pelayanan kepada mereka semakin mudah. Terutama saat wukuf, jemaah risti yang sakit dan tidak mampu melaksanakan sendiri dilakukan safari wukuf dengan menggunakan mobil (ambulans).

Hadirnya aplikasi Haji Pintar milik Kemenag yang mengedepankan teknologi digital juga semakin memudahkan pelayanan kepada jemaah. Penggunaan aplikasi ini diharapkan meningkatkan kualitas dalam melayani jemaah haji. Aplikasi milik Kemenag ini mendapatkan penghargaan dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah sebagai aplikasi haji terbaik. Sebuah terobosan Kemenag dalam mengefektifkan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. □ - d

*)**Mohammad Sobirin**, Wartawan *Kedaulatan Rakyat*, Anggota Media Center Haji PPIH Arab Saudi 2013.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk *SKH Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pangan Nabati, Mampukah Menjawab Pencapaian SDGs?

Leonie Margaretha Widya P

yang diperlukan oleh manusia dan juga dapat memberikan manfaat kesehatan. Mengonsumsi olahan kedelai seperti tempe misalnya, dapat membantu mengontrol kolesterol dan gula darah. Buah-buahan juga erat dikaitkan dengan tingginya kandungan antioksidan yang dapat membantu menangkal radikal bebas di dalam tubuh. Sebaliknya, konsumsi berlebih pangan hewani dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Pada dasarnya pangan hewani seperti telur, ikan, dan daging juga mengandung zat gizi yang dibutuhkan anak-anak hingga dewasa. Pangan hewani mengandung asam amino yang lebih lengkap dan mineral yang lebih banyak. Komposisi gizinya tidak kalah dari pangan nabati. Bagi anak-anak, pangan hewani, seperti telur dan ikan sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Konsumsi pangan hewani yang rendah justru dapat berdampak buruk, antara lain menyebabkan anemia dan menghambat pertumbuhan.

Pangan Beragam

Dalam rangka menekan angka stunting, konsumsi pangan nabati harus diimbangi dengan konsumsi pangan hewani. Pangan nabati tidak dapat menggantikan posisi pangan hewani secara absolut. Pemerintah telah menegaskan hal ini dengan diterbitkannya panduan tentang bahan makanan yang perlu dikonsumsi supaya dapat hidup sehat. Konsep yang disampaikan pada panduan tersebut adalah *ēIsi Piringku*. Konsep ini menjelaskan bahwa konsumsi pangan harus disertai dengan proporsi

keragaman yang baik, yang terdiri dari pangan nabati dan hewani dalam jumlah cukup. Sehingga kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi dan dapat berkontribusi terhadap kualitas kesehatan bangsa.

Pemerintah dan setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam rantai pangan perlu bahu membahu dalam implementasi konsep *ēIsi Piringku*. Gerakan ini tidak dapat hanya dilakukan secara insidental, tetapi harus berkelanjutan dan serentak di berbagai daerah. Tentu saja ini bukanlah hal yang mustahil. Kota Yogyakarta telah membuktikan bahwa prevalensi stunting sudah mencapai 10,80% pada tahun 2022. Keluarga dalam hal ini orang tua menjadi pilar penting yang dapat berperan besar melalui peningkatan keanekaragaman pangan yang dikonsumsi sehari-hari. Sehingga target Indonesia tanpa kelaparan tidak menjadi wacana. □ - d

*)**Leonie Margaretha Widya P**, Staf *Pendidik pada Fakultas Teknobiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

Pojok KR

Aktivitas kawah Dieng meningkat
-- Tetap waspada. ***

Sistem Pemilu terbuka dan tertutup, MK anggap wewenang legislatif.
-- Nah, semua ada kekurangan dan kelebihan. ***

Daftar Calon Haji 2023, dipilih yang tertua..
-- Mengurangi daftar tunggu para lansia.

Beraba

PIKIRAN PEMBACA

Naskah bisa dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/Scan KTP

atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.

Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Membahas Kembali Pencoretan KPM

MEMBACA berita bahwa Kementerian Sosial (Kemensos), belum lama ini telah mencoret 10.249 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), karena dianggap tidak tepat sasaran, sebagai penerima bansos dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Yang menarik, kata Menteri, bahwa penerima bansos tersebut ada yang tercatat sebagai direksi atau pejabat di sebuah perusahaan. Dianggap pejabat di sebuah perusahaan kok bisa menerima Bansos ya?

Tetapi setelah dicek, realisasinya memang orang tersebut miskin. Karena itu, tentu perlu perhatian tersendiri. KPM dibagikan untuk keluarga miskin yang layak, atau tidak boleh untuk seorang pejabat perusahaan yang memang kekurangan. Karena itulah, saya setuju dipikirkan lagi masalah tersebut. Sebab masalah seperti itu, seperti kata Mensos Tri Rismaharini, banyak kejadian. Inilah yang perlu pembahasan kembali.

Erma Sulistiyani SH,
Ngupasan Purworejo

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriga Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSos.

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabadari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afifiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafiis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)...Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm...Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd, Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragi Dedy TP